

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang di persepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi.

Menurut Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.¹ Pengindraan disini merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu panca indra. Proses pengindraan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indranya. Persepsi timbul dikarenakan adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan suatu persepsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung

¹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Persepsi Sosial*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2003), hal 53

dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.² Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama yaitu:³

- a. Seleksi, adalah penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, adalah proses mengorganisasikan sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
- c. Interpretasi dan persepsi, kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Selanjutnya wakgito menyatakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama.⁴

Ada tiga tahapan yang mempengaruhi persepsi yang kesemua tahapan tersebut bersifat kontinu satu dengan lainnya. Tahapan tersebut antara lain: *pertama*, terjadinya stimulasi alat indra, pada tahap ini alat-alat indra (dirangsang). Rangsangan ini berasal dari lingkungan seperti music, menonton televise, mencium bau parfum orang yang sedang bicara, dll. Meskipun setiap orang memiliki kemampuan ini, terkadang tidak digunakan secara maksimal atau baik. *Kedua*, stimulasi alat indra diatur, artinya setelah rangsangan diberikan dan alat indra telah

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.hal 759

³ Asto Budi, “ Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kinerja Guru Mata Pelajaran Chasis dan Sistem Pemindah Tenaga Terhadap Kepuasan Siswa Kelas II Teknik Otomotif ”, (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negri Yogyakarta, 2011), hal 12

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial:.....*, hal 54

menangkapnya, maka rangsangan tersebut akan diatur dalam prinsip-prinsip, perkemiripan, kemiripan, dan kelengkapan. *Ketiga*, stimulasi alat indra dievaluasi dan ditafsirkan, dalam tahapan ini rangsangan akan ditafsirkan dan menghasilkan suatu persepsi. Namun tidak semua stimulus/rangsangan yang diberikan akan diterima oleh otak dan dikeluarkan sesuai dengan stimulus yang diperoleh.⁵

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Baltus ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, diantaranya:⁶

- a. Kemampuan dan keterbatasan fisik dan panca indra dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu ataupun permanent.
- b. Kondisi lingkungan.
- c. Pengalaman masa lalu. Bagaimana cara individu untuk menginterpretasikan atau bereaksi terhadap suatu stimulus tergantung dari pengalaman masa lalu
- d. Kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu, maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan tersebut.
- e. Kepercayaan, prasangka dan nilai, individu akan lebih memperhatikan dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengannya.

⁵ Anto Budi, Pengaruh Persepsi Siswa,,,,,, hal 12-13

⁶ Ibid, hal 13-14

Factor yang paling berperan dalam persepsi adalah factor dari dalam diri seseorang (factor internal) dan factor stimulus serta lingkungan (factor eksternal) agar stimulus dapat dipersepsikan, stimulus tersebut harus cukup kuat. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Lingkungan atau situasi yang melatar belakangi stimulus juga berpengaruh, terlebih lagi jika objek tersebut adalah manusia. Objek yang sama, dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. adapun faktor internal dan eksternal itu antara lain:

a. Faktor Internal.⁷

- 1) Kebutuhan psikologis, kebutuhan yang pada awalnya tidak terlihat dapat terlihat karena adanya kebutuhan psikologis. Seperti, pada saat seseorang harus fenomena ini dapat dilihat dari daerah padang pasir/gurun.
- 2) Latar belakang, orang-orang dengan latar belakang tertentu cenderung akan mencari orang-orang dengan latar belakang yang sama.
- 3) Pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin sama dengan pengalaman pribadinya.
- 4) Perhatian, perhatian adalah proses mental kita ketika stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lain melemah.

⁷ Ibid, hal 14

b. Faktor Eksternal.⁸

- 1) Intensitas, rangsangan yang lebih intens, mendapat lebih banyak tanggapan/persepsi dibandingkan dengan rangsangan yang kurang intens
- 2) Ukuran, barang yang memiliki ukuran lebih besar lebih menarik perhatian. Barang yang lebih besar, lebih cepat terlihat.
- 3) Konstan, hal lain yang dari pada hal-hal yang biasa dilihat cenderung menarik perhatian.
- 4) Gerakan, seperti halnya ukuran dan konstan, hal yang mempunyai gerak lebih menarik akan menarik perhatian lebih bagi yang melihat.

B. Perilaku Pemilih

1. Pengertian Perilaku Pemilih

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku

⁸ Ibid, hal 15

yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.⁹

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.¹⁰ Pemilih dalam hal ini dapat berupa kontestan maupun masyarakat pada umumnya. Kontestan adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi seperti partai politik.

Berdasarkan UU No.10 tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi karena alasan tertentu pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar.

⁹ Ramlan Surbakti "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal 15

¹⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pilkada Secara Langsung*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), hal 46

Dalam peraturan (KPU) No. 35 tahun 2008 tentang pemungutan dan penghitungan suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut harus mendaftarkan diri ke TPS yang baru, paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi, secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

Menurut Affan Gaffar, untuk menganalisa perilaku pemilih, maka terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis (dikenal pula dengan mazhab Columbia) dan pendekatan psikologis (dikenal dengan mazhab Michigan).

Pendekatan sosiologis menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kota pemilihan merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi seperti profesi, kelas sosial, agama, dan lain-lain. Dengan kata lain latar belakang seseorang atau kelompok orang seperti jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, ideologi, dan asal daerah merupakan variabel independen yang mempengaruhi keputusan memilih. Selanjutnya untuk pendekatan psikologis, mengungkapkan bahwa keputusan memilih terhadap partai politik atau kandidat didasarkan pada respon psikologis, seperti kualitas personal kandidat, performa pemerintah yang saat itu berkuasa, isu-isu yang dikembangkan oleh kandidat, dan loyalitas terhadap partai.¹¹ Selain dua pendekatan tadi terdapat juga pendekatan pilihan rasional yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapat oleh individu tersebut.¹²

Menurut Adman Nursal ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat perilaku memilih, antara lain:¹³

a. Pendekatan Sosiologis (Mahzab Columbia)

Menurut mahzab Columbia pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan social, usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, latar belakang keluarga, kegiatan dalam kelompok formal dan informan lainnya memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih.

¹¹ Affan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1992), hal 4-9

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010) hal 187

¹³ Adman Nursal, *Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) Hal 54-73

b. Pendekatan Psikologis

Mazhab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini didasari oleh konsep sikap dan sosialisasi.

c. Pendekatan Rasional

Pemilih yang dapat melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang dilakukan oleh kandidat. Selain itu, pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan dalam pengambilan keputusan memilih bukan pada faktor kebiasaan atau kebetulan, bukan pula untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan umum, menurut pertimbangan dan pemikiran logis.

d. Pendekatan Marketing

Newman dan Sheth mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Menurut model ini, perilaku memilih ditentukan oleh tujuan domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

1) Isu dan kebijakan publik

Komponen isu dan kebijakan publik mempresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.

2) Citra sosial

Citra social adalah citra kandidat dalam pemikiran pemilih mengenai “berada” didalam kelompok social mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat politik.

3) Perasaan Emosional

Dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjukkan oleh *Policy* politik yang ditawarkan.

4) Citra Kandidat

Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagi karakter kandidat

5) Peristiwa Mutakhir

Mengacu pada himpuan peristiwa, isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

6) Peristiwa Personal

Mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi yang dialami oleh kandidat

Keempat pendekatan perilaku saling melengkapi atau menguatkan sama lainnya. Untuk memudahkan kepentingan praktis, keempat pendekatan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut: 1). Social imagery atau citra social (pengelompokan social), 2). Identifikasi partai, 3). Kandidat, 4). Isu dan kebijakan publik, 5). Peristiwa tertentu 6). Faktor-faktor epistemik.

2. Tipe-tipe Pemilih

Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya. Perilaku ini berasal dari persepsi pemilih dalam melihat profil maupun *trade record* dari partai politik maupun kandidat/caleg. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-rasional dalam menentukan keputusannya.

Firmanzah membagi kesamaan yang akan dalam menilai kedekatan dengan partai politik atau kontestan, yaitu *pertama*, kesamaan akan hasil akhir yang ingin dicapai (*policy-problem-solving*), dan *kedua*, kesamaan akan faham dan nilai dasar ideologi (*ideology*) dengan salah satu partai politik atau seorang kandidat.¹⁴ Selain itu firmanzah juga membagi pertimbangan pemilih yang mempengaruhi terbagi atas tiga faktor secara bersamaan, *pertama* kondisi awal pemilih, *kedua* media masa, dan *ketiga* partai politik atau kontestan.

Faktor *pertama* adalah kondisi awal, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selain itu pula tingkat pendidikan dan ekonomi. *Kedua*, media masa disini memiliki keberpihakan dan bisa dalam memberikan informasi kontesta. dan *ketiga* yaitu karakteristik dari partai politik dan kontestan itu sendiri, seperti reputasi, kepemimpinan. Ketiga hal ini akan mempengaruhi *judgement* pemilih tentang kedekatan dan ketertarikan mereka tentang partai politik.

¹⁴ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) Hal 115

Berdasarkan pendekatan kesamaan atau kedekatan idiologi dan policy-problem-solving, firmansah memetakan tipologi kedalam empat kolo tipologi pemilih. Empat tipologi tersebut terdiri dari:¹⁵

a. Pemilih Rasional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang tinggi pada “*policy problem solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor idiologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan idiologi pada partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikologis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kandidat, dari pada paham dan nilai partai atau kontestan.

b. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam memutuskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat idiologis. Pentingnya ikatan idiologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau kontestan cukup tinggi dan tidak semudah “*rational votes*” untuk berpaling ke partai lain. pemilih jenis ini adalah pemilih

¹⁵ Ibid hal 116

yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini harus di “*manage*” sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan. Pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan *figure* dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrschneider, 2002). Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

d. Pemilih Skeptis

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kandidat, juga sebagai sesuatu yang

penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologi mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memperdulikan program kerja atau “platform” dan kebijakan partai politik.

C. Pengaruh persepsi masyarakat pada caleg terhadap perilaku memilih dalam pemilihan legislatif 2014 di Sidoarjo

Persepsi Masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu-individu menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada tindakan mereka. Persepsi dapat disebut juga sebagai proses untuk memahami informasi tentang lingkungan/peristiwa melalui penglihatan maupun pendengaran.¹⁶

Proses pandangan merupakan hasil hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diindera akan mempengaruhi tingkah laku. Secara garis besar persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap oleh indra manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat, secara garis besarnya masyarakat

¹⁶ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*,,,,,, hal 57

merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Jika dikaitkan dengan pemilihan legislatif yang melibatkan caleg (calon legislatif) yang dimaksud dengan persepsi masyarakat disini adalah pandangan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap caleg. Pandangan masyarakat pada caleg ini yang nantinya akan mempengaruhi perilaku mereka pada saat pemilu dilakukan, persepsi yang berbeda dari masing-masing masyarakat akan menentukan pilihannya sesuai dengan tipologi mana yang dimiliki oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat antara lain: *pelaku persepsi, target atau objek persepsi, dan situasi.*¹⁷ Tiga faktor yang sudah disebutkan merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, selain faktor eksternal yang dijelaskan diatas terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat yaitu faktor internal yaitu kedekatan emosional. Faktor internal sering kita jumpai digunakan oleh masyarakat yang cenderung memiliki tipologi pemilih tradisional, hal itu dikarenakan pemilih tradisional lebih mementingkan kedekatan emosional dibandingkan yang lainnya.

Dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan selama ini, sering kita jumpai beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk meneruskan kegiatan sehari-hari yang

¹⁷ Ibid hal 59

rutin mereka lakukan dibandingkan dengan mengikuti / mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Banyak faktor yang bisa dilihat dari fenomena ini salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan mereka adalah faktor tidak kenalnya masyarakat dengan caleg yang maju dalam pileg. Hal ini yang selama ini menjadi faktor utama, bahkan tidak jarang caleg yang ingin dikenal oleh masyarakat rela mengeluarkan uang hanya untuk mengadakan pertunjukan guna mengumpulkan massa dan memperkenalkan dirinya.

D. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional diadopsi oleh ilmuwan politik dari ilmu ekonomi. Karena didalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan perilaku politik yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauh mana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan. Para pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya paling minim. Dalam konteks teori semacam itu, sikap dan pilihan politik tokoh-tokoh populer tidak selalu diikuti oleh para pengikutnya kalau ternyata secara rasional tidak menguntungkan. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya bagi pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

Sementara itu Ramlan Surbakti dan Dennis Kavanaugh¹⁸ menyatakan bahwa pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (self interest) maupun untuk kepentingan umum.

Sehingga pada kenyataannya, terdapat sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yaitu faktor situasional yang juga turut mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihan politiknya pada pemilu. Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut teori rasional, faktor-faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi

¹⁸ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992), hal.146.

pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada persepsi dan sikap seorang pemilih terhadap kepribadian kandidat tanpa memperdulikan label partai yang mengusung kandidat tersebut.

Pengaruh isu yang ditawarkan bersifat situasional (tidak permanent/berubah-ubah) terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan khususnya yang kontekstual dan dramatis. Sementara itu dalam menilai seorang kandidat menurut Him Melweit, terdapat dua variabel yang harus dimiliki oleh seorang kandidat. Variabel pertama adalah kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat apabila ia kelak menang dalam pemilu. Variabel kedua adalah kualitas simbolis yaitu kualitas keperbadian kandidat yang berkaitan dengan integrasi diri, ketegasan, kejujuran, kewibawaan, kepedulian, ketaatan pada norma dan aturan dan sebagainya.

Pendapat Ramlan Surbakti dan Him Melweit tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dan Nimmo¹⁹ dalam bukunya *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* yang mengatakan bahwa:

¹⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1992 hal 148

Pemberi suara yang rasional pada hakikatnya aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warganegara. Orang yang rasional :

1. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif.
2. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif yang lain.
3. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif; jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
4. Selalu memilih alternatif yang peringkat preferensi paling tinggi dan.
5. Selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama, dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif yang lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang peringkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Penerapan teori rational choice dalam ilmu politik salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat terhadap tokoh atau partai tertentu dalam konteks pemilu. Teori pilihan rasional sangat cocok untuk menjelaskan variasi perilaku memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan karakteristik. Pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis

maupun psikologis. Dua pendekatan terakhir tersebut menempatkan pemilih pada situasi dimana mereka tidak mempunyai kehendak bebas karena ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya. Sedangkan dalam pendekatan rasional yang menghasilkan pilihan rasional pula terdapat faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang, misalnya faktor isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Dengan demikian muncul asumsi bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik tersebut. dengan kata lain pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Individu sebagai penyokong legitimasi sistem pemilihan demokratis adalah seorang warga negara yang memiliki kemampuan untuk mengetahui konsekwensi dari pilihannya. Kehendak rakyat merupakan perwujudan dari seluruh pilihan rasional individu yang dikumpulkan (*public choice*). Dalam konteks pemilu di Indonesia, istilah *public* digunakan untuk mewakili masyarakat Indonesia yang terdiri dari individu-individu dengan keanekaragaman karakteristiknya. Mereka bertindak sebagai responden dalam pemilu yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pilihan politik. *Public choice* dalam konteks pemilu sangat penting artinya bagi kelangsungan roda pemerintahan di suatu negara. Bagaimana agenda politik dalam suatu negara itu disusun, tergantung dari pilihan masyarakat terhadap agenda yang ditawarkan melalui pemilihan umum

E. Teori Otoritas Max Wabber

Max Wabber lahir di Effurt, Jerman pada 21 April 1864. Berasal dari keluarga kelas menengah. Ia tercatat sebagai pendiri masyarakat sosiologi Jerman pada tahun

1910. Webber menaruh perhatian pada subjek kajian dengan agenda yang amat luas, meliputi agama, ekonomi, relasi politik, hokum dan metodologi. Dia adalah tokoh filsafat sosial yang banyak menghasilkan karya besar. Salah satu teori tentang kewenangan atau yang lebih terkenal dengan otoritas.²⁰

Webber membedakan antara tiga jenis sistem otoritas, yaitu:

1. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas ini didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe wewenang ini umumnya ditemukan pada Negara-negara demokrasi modern. Rakyat lebih percaya pada akal kecerdasan, bakat kepemimpinan, dan objektivitas serta stabilitas undang-undang. Seseorang yang sedang melakukan otoritas legal-rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah, dia didefinisikan memiliki posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas legal rasional itu.

Dewasa ini bentuk legitimasi yang lazim adalah kepercayaan terhadap legalitas, yakni ketaatan pada putusan – putusan yang secara formal benar dan yang diterapkan melalui tata cara yang dikenal. Pada masa lampau, pengesahan terhadap suatu kewenangan sering kali memerlukan kesepakatan umum. Namun, pengakuan dari mayoritas sudah cukup. Dalam keadaan demikian, maka wewenang biasanya dipakai kepada mayoritas kepada minoritas.²¹

²⁰ George Ritzer & Dauglas J. Goddman, *teori sosial modern*, (Jakarta: prenada media Group, 2007), hal 37

²¹ Soejono Soekanto, *mengenal tujuh tokoh sosiologi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67

2. Otoritas Tradisional

Tipe otoritas ini berlandaskan pada tradisi, adat istiadat, atau perasaan spontan pada pengikut. Orang menjadi pemimpin bukan karna bakatnya, melainkan sudah diatur demikian di masa lampau. Misalnya, anak mewarisi tahta ayahnya, lembaga kepemimpinan dianggap suci dalam diri dan mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas dari soal kecakapannya atau dukungannya mayoritas.

Otoritas tradisional merupakan otoritas yang paling tua di universal. Otoritas ini didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi – sanksi magis yang memperkuat disiplin diri untuk mengubah perilaku yang sudah merupakan adat – istiadat. Pada saat yang bersamaan, wewenang/otoritas yang ada langsung terus dan dianggap sah karena adanya kepentingan – kepentingan yang tertanam dalam kuatnya. Pengaruh kedudukannya yang berkembang secara logis terhadap perilaku actual tidak selalu sesuai dengan idealismenya, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa pengaruhnya sangat besar.²²

3. Otoritas Kharismatik.

Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Istilah charisma digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Charisma harus dipahami sebagai kualitas luar biasa tanpa memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh atau hanya berdasar pada dugaan orang belaka. Ciri-ciri kharismatik adalah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena

²² ibid

merasa dirinya dipanggil untuk itu. Mereka tidak melakukannya karena terpaksa melainkan karena ketulusan.²³

Biasanya ketaatan terhadap wewenang tertentu ditentukan oleh kombinasi beberapa motif, seperti kepentingan diri, keterikatan pada tradisi, kepercayaan pada legalitas, dll. Seringkali mereka yang mematuhi suatu wewenang tidak menyadari sebab-sebabnya.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada.²⁵

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga diharapkan dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjutan yang telah dicapai. Hasil penulisan terdahulu tersebut antara lain ialah:

²³ Zainuddin Maliki, *Narasi agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya:LPAM, 2003, hal 186

²⁴ Soejono Soekanto, *mengenal tujuh..... hal 68*

²⁵ Syarifuddin Jurdi, *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin* (Makassar:UIN Alauddin,2012),11-12.

Skripsi yang berjudul *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi banten tahun 2011 di kecamatan karawaci kota tanggerang* ditulis oleh Tri Satya Puspasari pada tahun 2012 di program S1 fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas sultang ageng tirtayasa Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kandidat mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku memilih, karna pemilih melihat dari citra suatu kandidat.²⁶

Tesis yang berjudul *Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (studi tentang pemilihan gubernur / wakil gubernur jawa tengah tahun 2008 di kota semarang) yang ditulis oleh Adhi Putra Wicaksono pada tahun 2009 di program pasca sarjana studi magister ilmu politik universitas diponegoro Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan secara persial maupun bersama-sama, variable citra kandidat, tingkat identifikasi partai dan efektivitas kampanye tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih.²⁷

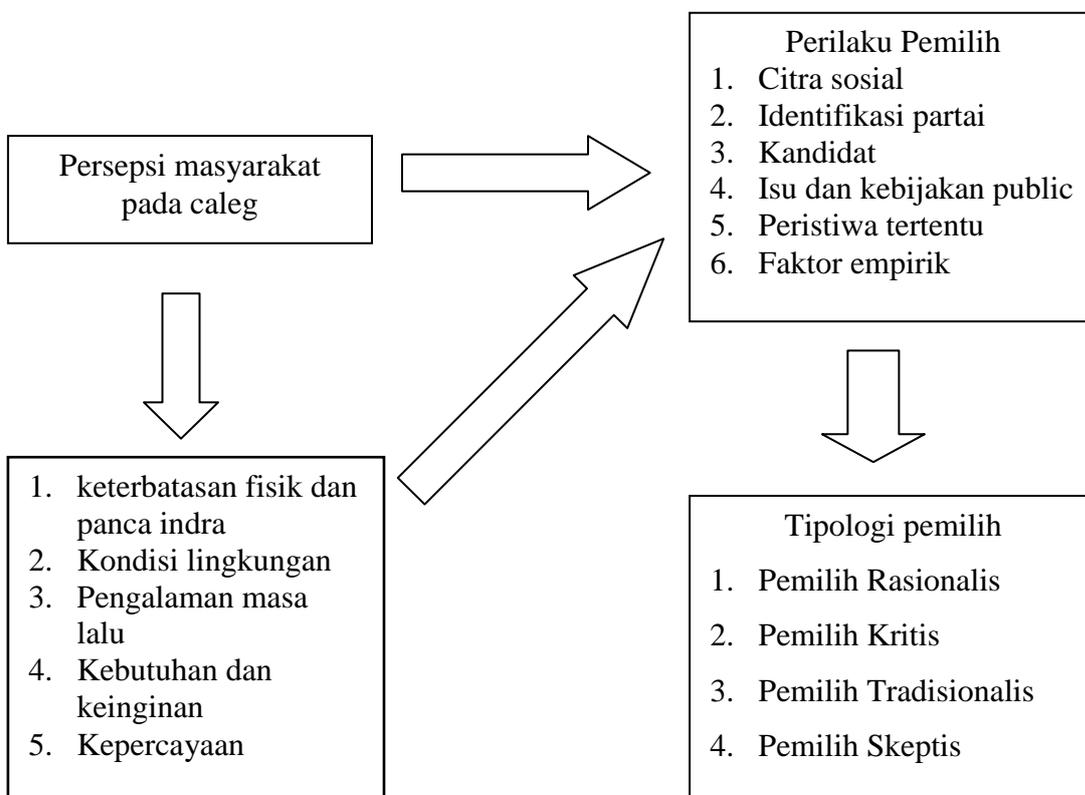
²⁶ Tri satya purpasari, *skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Banten Tahun 2011 di Kecamatan Karawaci Tangerang*, (Universitas Sultan Ageng Trisatya, Serang: 2012).

²⁷ Adhi Putra Wicaksono, *Tesis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (studi tentang pemilihan gubernur / wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2008 di kota Semarang), (Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

G. Kerangka konseptual

Tabel 2.1

Hubungan Antara Persepsi Masyarakat Dengan Perilaku Memilih



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penulisan, di mana rumusan masalah penulisan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang empirik.²⁸ Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. H_0 (H_{nol}), yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.
2. Hipotesa alternative (H_a), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan.

Berdasarkan pemaparan yang sudah di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh persepsi masyarakat pada caleg terhadap perilaku memilih dalam pileg tahun 2014 di Sidoarjo.
2. H_a : Ada pengaruh persepsi masyarakat pada caleg terhadap perilaku memilih dalam pileg tahun 2014 di Sidoarjo

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 223